

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pada masa reformasi penyelenggaraan pemerintahan didorong oleh otonomi daerah. Hal yang terpenting Republik Indonesia masa reformasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui UU No. 22 tahun 1999. Dalam UU No. 22 tahun 1999 disebutkan penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah, sehingga seluruh kewenangan sudah berada pada daerah kabupaten dan daerah kota. Sejak di berlakukannya Undang-Undang No. 22, kemudian direvisi menjadi Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan diubah dengan Undang-undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 32 Tahun 2004, maka telah di limpahkannya kewenangan kepada daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan adanya kebijakan tentang Otonomi Daerah, maka daerah akan mampu mengalami proses pemberdayaan dan mampu membangun kemandirian daerah secara signifikan.

Menurut Widjaja (2002:13) mengemukakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah telah mengubah paradigma sentralisasi pemerintah ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab kepada daerah. Perubahan paradigma diatas sekaligus juga merupakan kesempatan yang penting bagi pemerintah daerah untuk

membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan local sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat local.

Pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah dapat dilihat dari banyak hal. Namun demikian, secara umum ada dua prasyarat utama yang dapat digunakan sebagai tolak ukur pengembangan cirri desentralisasi dan otonomi daerah. Menurut Sayekti (2008:12) dua prasyarat tersebut adalah pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan terhadap urusan yang menyangkut daerahnya, dan pemberian kebebasan untuk penguasaan dan pengalihan terhadap berbagai sumber potensi daerah yang bersangkutan.

Widjaja (2009:2) mengemukakan inti dari konsep otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan.

Setelah konsep otonomi daerah diberlakukan, maka daerah-daerah yang merasa pembangunan didaerahnya masih tertinggal, menginginkan adanya pemekaran daerah. Pemekaran daerah dimaksudkan untuk meningkatkan keajahteraan masyarakat. Pemekaran akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan, dimana terjadi ketimpangan-ketimpangan pembangunan dan tidak meratanya sector-sektor pembangunan di

semua wilayah, sementara potensi wilayah memungkinkan untuk dikembangkan atau digali sebagai sumber-sumber penghasilan pembangunan.

Dengan bergulirnya reformasi politik sebagai dampak dari krisis moneter, tuntutan terhadap pemekaran di lingkungan propinsi Sumatera Utara juga demikian marak sebagaimana propinsi-propinsi lain di Indonesia. Tuntutan-tuntutan pemekaran yang dilakukan masyarakat ternyata membuahkan pemekaran yang relatif pesat. Salah satu daerah yang menuntut pelaksanaan pemekaran wilayah adalah kabupaten Serdang Bedagai yang dimekarkan dari kabupaten Deli Serdang. Dasar pertimbangan untuk dilakukannya pemekaran adalah luas wilayah dan jumlah penduduk yang begitu besar untuk satu Kabupaten. Dan Deli Serdang termasuk Kabupaten dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang begitu besar.

Terbentuknya Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan UU RI Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai pada 18 Desember 2003 yang disahkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada masa pemerintahannya, yang merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Deli Serdang yang beribukota di Sei Rampah dan diresmikan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004. Terbentuknya Kabupaten ini sebagai wujud akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah sehingga menjamin perkembangan dan kemajuan di masa yang akan datang.

Sejak terbentuknya kabupaten serdang bedagai Bupati dan aparaturn pemerintahan melakukan pembangunan di berbagai sector dan ingin jadikan serdang bedagai menjadi salah satu kabupaten terbaik di Indonesia. Dengan memanfaatkan sumber daya alam di Kabupaten Serdang Bedagai yang paling menonjol diantaranya: sektor pertanian, perkebunan dan perikanan serta sektor pariwisata. Perkembangan Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat berdasarkan bidang SDM dan SDA, ekonomi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana perkembangan Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Deli Serdang propinsi Sumatera Utara. Proses ini diawali pada awal terbentuknya Kabupaten Serdang Bedagai di tahun 2004 hingga perkembangan kabupaten ini pada tahun 2013.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi

adalah sebagai berikut:

1. Sejarah singkat Serdang Bedagai
2. Kebijakan pemerintah dalam pemekaran daerah di Indonesia
3. Proses terbentuk dan berkembangnya Kabupaten Serdang Bedagai 2004-2013

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menjaga focus masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka masalah-masalah di kaji tersebut dibatasi pada perkembangan Kabupaten Serdang Bedagai (2004-2013).

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Bagaimana perkembangan Kabupaten Serdang Bedagai (2004-2013) berdasarkan sector SDM, ekonomi, sosial, dan pariwisata.

1.5 Tujuan Penelitian

Pada umumnya sebuah kegiatan penelitian berorientasi kepada tujuan tertentu, dalam kaitan ini maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sejarah terbentuknya Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan Kabupaten Serdang Bedagai (2004-2013) berdasarkan sector SDM, ekonomi, sosial, dan pariwisata.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat member manfaat sebagai berikut:

1. Dapat menambah wawasan peneliti tentang sejarah Serdang Bedagai.

2. Memberi informasi dan data-data kepada masyarakat luas tentang sejarah pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Memberi informasi kepada pemerintah setempat dan masyarakat tentang perkembangan Kabupaten Serdang Bedagai
4. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah yang ingin melakukan penelitian lanjutan tentang Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Menambah sumber dan bahan pembelajaran mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah UNIMED khususnya.

THE
Character Building
UNIVERSITY